

Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan*

OLEH:

ALFIANTI RAHMAN

E 111 08 256

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN
DINAMIKA PENETAPAN CALON BUPATI DARI PARTAI GOLKAR
DI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

Nama Mahasiswa : ALFIANTI RAHMAN

Nomor Pokok : E 111 08 256

Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik, jurusan Politik Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Universitas Hasanuddin


Makassar, Nopember 2013

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

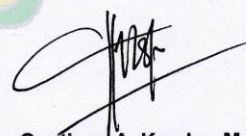

Dr. Muhammad Saad, MA
NIP: 19550128 198502 1001


A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si
NIP: 19801114 200812 1003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi
Ilmu Politik


Dr. H. A. Gau Kadir, MA
NIP: 19501017 198003 1002


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP: 19730813 199803 2001

HALAMAN PENERIMAAN
DINAMIKA PENETAPAN CALON BUPATI DARI PARTAI GOLKAR
DI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

Nama Mahasiswa : ALFIANTI RAHMAN
Nomor Pokok : E 111 08 256
Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, Nopember 2013

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Dr. Muhammad Saad, MA (.....)

Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si (.....)

Anggota : Drs. H. A. Yakub, M.Si (.....)

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si (.....)

Ariana Yunus, S.IP, M.Si (.....)

ABSTRAK

ALFIANTI RAHMAN, NIM E11108256, dengan judul **“Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018”**. Dibawah Bimbingan **Dr. Muhammad Saad MA** dan **A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.**

Partai Golkar Bone menjadi incaran enam orang kandidat Bupati. Keenam kandidat tersebut adalah, Andi Mangunsidi Massarapi, Andi Fahzar M. Padjalangi, Andi Irsan Idris Galigo, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar Rosalim, dan Ambo Dalle. A Fahsar Padjalangi adalah salah satu orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon Bupati Bone dari Partai Golkar, yang dalam perjalanannya kemudian ditetapkan sebagai calon bupati di pilkada Bone. Penetapan calon bupati tersebut digelar pada rapat pleno DPP Partai Golkar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana proses pengambilan keputusan penentuan calon bupati partai golkar di Kabupaten Bone.

Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan dasar penelitian studi kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder dengan wawancara mendalam, dan wawancara terstruktur. Data dari hasil wawancara dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat sesegera mungkin terungkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penentuan dilakukan, ada proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada kabupaten, merekrut semua bakal calon yang potensial. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan. Penetapan A. Fahsar ini didasarkan pada keputusan DPP Partai Golkar yang berpatokan pada hasil survei dari lembaga survei yang telah ditunjuk. Selain itu pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subyektif bagi diri penulis. Untuk itu perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar, justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, mungkin inilah hasil maksimal yang dapat disumbangkan yang senantiasa menyisipkan kekurangan dan kelemahan, sehingga untuk hal inipun penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, bapak Abd. Rahman dan ibu Darmiati, serta keluarga, yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil, nasehat, serta doa, sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Saad, MA selaku pembimbing I dan bapak A. Ali Armunanto S.IP, M.Si selaku pembimbing II, atas kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, serta bapak Andi Naharuddin. S.IP, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan;
3. Ibu Dr.Gustiana A.Kambo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik;
4. Bapak-bapak/Ibu-ibu Staf pengajar, Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Dr. Muhammad S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, MA, Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Drs. H. A. Yakub M.Si, A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Ariyana Yunus, S.IP, M.Si, Sukri Tamma, S.IP, M.Si, terima kasih atas semua kuliah-kuliah yang inspiratif dan akan mewarnai babakan kehidupan penulis selanjutnya, serta staf akademik Fisip Unhas, Bu Irma, Bu Hasnah, Bu Nanna. Terima kasih atas semua bantuannya;
5. Keluarga besar Demokratis 08;

6. Bapak-bapak informan di Bone yang telah dengan senang hati membantu penulis selama melakukan penelitian.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar di kemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Makassar, Nopember 2013

ALFIANTI RAHMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Dinamika	8
2.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	10
2.3 Norma-norma Penetapan Berdasarkan Undang-undang	12
2.4 Teori Pilihan Rasional.....	17
2.5 Kerangka Pemikiran	18
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi & Waktu Penelitian	20
3.2 Tipe Penelitian	20

3.3 Jenis Data Penelitian	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.5 Teknik Analisis Data	23

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	26
4.2 Gambaran Umum DPD Golkar Bone.....	29

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Proses penentuan calon bupati partai golkar.....	34
5.2 Proses Penetapan A. Fahsar Padjalangi menjadi Calon Bupati dari Partai Golkar.....	52

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang. Bisa dibilang partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan baru ada di negara modern.¹

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, yang biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan programnya.²

¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 397

² Ibid, hal. 403

Ada beberapa fungsi partai politik, salah satu diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2008, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan memiliki kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan untuk memperbanyak anggotanya. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.³

Sekian banyak partai yang ada di Indonesia, baik partai yang berdiri sejak orde lama, orde baru, maupun yang berdiri pada masa reformasi, Golkar adalah salah satu partai besar di Indonesia yang

³ Ibid, hal. 408

telah berdiri cukup lama. Juga telah mengalami banyak hal dalam menghadapi dinamika perpolitikan di Indonesia. Golkar, yang sekarang menjadi partai golkar, memiliki akar sejarah panjang dalam kehidupan politik dan kepartaian di Indonesia.

Golongan Karya yang semula berdiri dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), pada 19 Oktober 1964 sebagai kelompok federatif yang didukung oleh organisasi-organisasi fungsional. Namun sebelum pemilihan umum 1971 dilaksanakan, Presiden Soeharto telah mengumumkan agar dilakukan penggabungan partai-partai politik yang ada, yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok nasionalis, kelompok spiritual, dan Golongan Karya. Selanjutnya pada 14 Maret 1970, ada sembilan partai politik yang menggabungkan diri ke dalam dua golongan, yaitu golongan spiritual dan golongan nasionalis. Golongan Karya tergabung dalam golongan nasionalis.⁴

Golongan Karya mengalami masa-masa kejayaan di zaman Orde Baru. Kekuatan Golongan Karya pada masa Orde Baru yaitu 3 Jalur: A (ABRI), B (Birokrasi), G (Golongan Karya). Pada tahun 1998 terjadi Reformasi, sehingga menuntut Orsospol Golongan Karya melakukan perubahan menjadi Partai Golkar melalui Forum Munaslub yang merupakan pengambil keputusan tertinggi pada tahun 1998.

⁴ Anthonius Sitepu. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 78

Setelah masa orde baru berakhir, reformasi melahirkan banyak hal baru, diantaranya Undang-undang No.32 Tahun 2004. Di dalamnya dijelaskan tentang otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partai politik memainkan peran sebagai penyaring utama dari seleksi calon elit lokal yang akan dipilih rakyat dalam pemilihan. Maka partai politik memiliki tanggungjawab moral untuk menghadirkan figur calon dengan *track record* yang layak dipilih, bukan calon yang hanya akan menguntungkan partai politik semata.⁵

Dibanding pemilu legislatif dan presiden, pemilihan kepala daerah sebenarnya jauh lebih penting bagi masyarakat lokal. Sebab melalui proses pemilihan daerah ini, masyarakat lokal bisa menentukan nasibnya sendiri berkaitan dengan kepentingan mereka di daerah. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala daerah ini selalu

⁵ Donni Edwin, dkk. 2005. *Pilkada Langsung*. Jakarta: Partnership, hal. 24

dipahami dalam konteks otonomi daerah, sebagai upaya masyarakat lokal untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya melalui partisipasi dalam menentukan pemimpin.⁶

Apabila ditempatkan di dalam konteks demokrasi secara prosedural, semua warga negara memang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa terpilih sebagai kepala daerah, yang tercermin dari adanya jaminan kontestasi, partisipasi, dan kebebasan berpolitik. Bangunan politik pasca pemerintahan orde baru memungkinkan relatif terdapatnya jaminan seperti ini. Masyarakat diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi dalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih.⁷

Partai Golkar Bone menjadi incaran enam orang kandidat Bupati. Keenam kandidat tersebut adalah, Andi Mangunsidi Massarapi, Andi Fahzar M. Padjalangi, Andi Irsan Idris Galigo, Andi Sultan Pawi, Andi Syamsiar Rosalim, dan Ambo Dalle.

A.Fahsar Padjalangi adalah salah satu orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi bakal calon Bupati Bone dari Partai Golkar, yang dalam perjalanannya kemudian ditetapkan sebagai calon bupati di pilkada Bone. Penetapan calon bupati tersebut digelar pada rapat pleno DPP Partai Golkar.

⁶ Kacung Marijan. 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka, hal. 4

⁷ Ibid, hal. 83

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Dinamika Penetapan Calon Bupati dari Partai Golkar di Kabupaten Bone Periode 2013-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penentuan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Bone?
2. Adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses penentuan tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses penentuan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Bone serta dinamika yang terjadi di dalamnya.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat akademis
 - a. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses penentuan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Bone.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan mampu memberi penjelasan mengenai alasan dipilihnya seseorang sebagai bakal calon dari suatu partai.
- b. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang terkait dengan pemilihan kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memaparkan konsep dan teori yang berhubungan dengan pembahasan. Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah konsep dinamika, pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, norma-norma penetapan berdasarkan undang-undang, dan teori pilihan rasional.

2.1 Konsep Dinamika

Kata dinamika berasal dari kata 'dynamics' (yunani) yang bermakna kekuatan (force). "*dynamics is facts or concepts which refer to condition of change, expecially to forces.*" Dinamika adalah gerak/kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Menurut slamet santoso, dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Adapun dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Karenanya, dapat

disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis.

Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain:

1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup.
2. Memudahkan pekerjaan.
3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif dan efisien. Salah satunya dengan membagi pekerjaan besar sesuai bagian kelompoknya masing-masing atau sesuai keahlian.
4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat.

Hal ini juga berkaitan dengan dinamika sosial yang merupakan gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Dinamika sosial adalah penelaahan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam fakta-fakta sosial yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

Dinamika sosial meliputi :

1. Pengendalian sosial: proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat itu.
2. Penyimpangan sosial: perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.
3. Mobilitas sosial: peristiwa sosial dimana individu atau kelompok bergerak atau berpindah dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya.
4. Perubahan sosial: menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dsb.

2.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, *juncto* peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 6 tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau

kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2.3 Norma-norma Penetapan Berdasarkan Undang-undang

Pasal 29 (1) UU RI nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi :

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu bupati/walikota meliputi: menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan, mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acara, dan melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU provinsi.

Berdasarkan UU no.12 tahun 2008, PP 49 tahun 2008, aturan KPU tahun 2010, dan Juklak Golkar no.13 tahun 2011 tentang tata cara pencalonan kepala daerah dari partai golkar. Penetapan dilakukan berdasarkan mekanisme hasil survei, baik internal, maupun eksternal golkar, dimana yang diukur adalah peningkatan elektabilitas.

Pasal 3 peraturan komisi pemilihan umum nomor 68 tahun 2009 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala

daerah dan wakil kepala daerah menyatakan bahwa Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah :

- a. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan
- b. Pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

Pasal 58 UU Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25

(dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- n. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- p. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Pasal 59 (1) menyatakan bahwa Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah;

- a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

Ayat (2) menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat (2b) menyatakan bahwa pasangan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Ayat (2c) menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang dimaksud. (2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang dimaksud. (2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4 Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Inti dari politik menurut para tokoh analisis pilihan rasional adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional, ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya (*resource restraint*), dan arena itu ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien, ia harus memilih antara beberapa alternatif dan menentukan alternatif mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal baginya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari teori *rational choice*.⁸

Intisari teori pilihan rasional adalah bahwa ketika dihadapkan pada beberapa jenis tindakan, orang biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan mempunyai hasil yang terbaik. Pilihan rasional adalah bagian dari perangkat yang sangat diperlukan oleh para pakar ilmu politik, yang butuh perspektif lain untuk membantu menjelaskan mengapa individu mempunyai kepentingan, bagaimana mereka memandang kepentingan tersebut, dan distribusi aturan, kekuasaan, serta peran sosial yang menentukan batas-batas tindakan mereka.⁹

⁸ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 93

⁹ David Marsh dan Gerry Stoker. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media, hal. 76

Varian mainstream dari pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai semua kapasitas rasional, waktu, dan ketakterikatan emosi yang penting untuk memilih arah tindakan terbaik, tak peduli betapa kompleksnya pilihan tersebut. Ringkasnya, pilihan rasional menjelaskan tindakan individu dan hasil yang mereka tuju, dalam hal strategi mereka, pilihan mereka terhadap keadaan akhir yang menjadi arah kombinasi tindakan yang dipilih oleh berbagai pemain, dan keyakinan mereka tentang parameter seperti pilihan orang lain. Teori pilihan rasional mengambil preferensi, keyakinan, dan strategi feasibel individu sebagai penyebab tindakan yang mereka lakukan.¹⁰

2.5 Kerangka Pemikiran

Partai Golkar Bone telah menunjuk calon untuk maju mewakili partai dalam pemilihan bupati periode 2013-2018. Dalam pengambilan keputusan selalu ada pertimbangan-pertimbangan sampai akhirnya suatu keputusan ditetapkan. Sehubungan dengan hal ini, sebenarnya ada beberapa pertimbangan partai Golkar dalam penentuan A. Fahsar Padjalangi menjadi calon bupati dari partai tersebut. Proses penentuannya juga tidak lepas dari beberapa payung hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, diantaranya: UU RI no. 12 tahun 2008, PP no. 49 tahun 2008, peraturan KPU tahun 2010, dan juklak Golkar no.13 tahun 2011 tentang tatacara pencalonan kepala daerah dari partai Golkar.

¹⁰ Ibid, hal. 80, 81, 82

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih kabupaten bone sebagai lokasi penelitian adalah bahwa saat ini partai golkar kabupaten bone telah menentukan calon bupati dari partainya dan penelitian dilakukan untuk mengetahui beberapa hal mengenai penentuan calon tersebut. Waktu penelitian yaitu pada tahun 2013.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif analitik digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan gambaran mengenai alasan ditetapkannya seseorang menjadi calon bupati dari suatu partai, khususnya yang terjadi dalam partai golkar kabupaten bone.

3.3 Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Mereka yang dijadikan informan

adalah A. Akbar Yahya, selaku pelaksana tugas Ketua DPD I Partai Golkar Kab.Bone, A. Irwansyah, selaku sekretaris bidang pemenangan pemilu Partai Golkar Bone, dan seorang tim sukses 'Tafaddal', yang identitasnya tidak ingin disebutkan dalam tulisan ini.

b. Data Sekunder

Penulis melakukan telaah pustaka dengan menggunakan buku, koran, dll. Penulis juga menggunakan literatur, dokumen, dan referensi dari internet untuk membantu melengkapi data. Dalam hal ini penulis diberikan pedoman oleh bapak A. Irwansyah selaku informan, berupa Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Nomor: Juklak- 13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Bone, Nomor: 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi hasil penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara mendalam (*deep interview*)

Penulis menggunakan wawancara mendalam dalam pengumpulan data agar permasalahan lebih terbuka, dimana

pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya secara langsung. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Penulis menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Dalam usaha untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah yang diangkat. Informan yang diwawancarai adalah Ketua DPD I Partai Golkar Kab.Bone, sekretaris bidang pemenangan pemilu Partai Golkar Bone, dan seorang tim sukses calon bupati yang bersangkutan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengenai pengambilan keputusan ditetapkannya A. Fahsar Padjalangi sebagai calon bupati dari partai golkar, yang berupa hasil wawancara mendalam berupa jawaban-jawaban, ucapan-ucapan, ataupun perilaku yang tampak.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen berupa gambar dan tulisan untuk melengkapi data-data. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan agar mampu mempertajam analisis penulis dalam menjawab permasalahan yang terjadi. Dokumen yang juga dijadikan peneliti sebagai sumber referensi adalah berupa artikel, baik di surat kabar, internet, dll.

3.5 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan:

- a. Data apa yang masih perlu dicari,
- b. Hipotesis apa yang perlu diuji,
- c. Pertanyaan apa yang perlu dijawab,
- d. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan
- e. Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Teknik analisis data kualitatif peneliti gunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai dinamika penetapan calon bupati partai dari Golkar periode 2013-2018, dimana data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data dari hasil wawancara yang peneliti peroleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang didapat di lapangan, diketik atau ditulis rapi, terinci, serta sistematis, setiap selesai pengambilan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, oleh sebab itu laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian atau setiap data baru

didapatkan. Data-data tersebut kemudian direduksi, dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan tema penelitian.

2. Penyajian data

Peneliti melakukan penyajian informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dll. Peneliti menyajikan data berupa deskripsi untuk menggambarkan dengan jelas akar permasalahan pada penelitian yang telah dilakukan, sehingga akan memudahkan penulis untuk membaca bagian data yang sulit dimengerti. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan, dimana peneliti menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data dari awal. Dalam hal ini peneliti telah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemukan di lapangan, mulai dari pencatatan pola-pola sistematis penelitian, pencatatan-pencatatan data wawancara yang telah didapatkan dari beberapa informan, konfigurasi-konfigurasi, penggunaan alur sebab-akibat, dan menarasikan literatur serta referensi buku sosial dan politik. Hal itu kemudian diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dengan teori-teori yang sesuai.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan beberapa hal yang terkait dengan lokasi penelitian.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone

Bone dahulu disebut “tanah bone”. Berdasarkan *lontarak* bahwa nama asli bone adalah pasir, dalam bahasa bugis dinamakan bone adalah *kessi* (pasir). Dari sinilah asal-usul sehingga dinamakan *Bone*. Kabupaten Bone adalah salah satu daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Watampone adalah sebuah [kota](#) di [Kabupaten Bone](#). Sebelum tahun 2003, kota ini memiliki status [kota administratif](#) dengan tiga [kecamatan](#) dan 24 kelurahan serta mencakup wilayah seluas 138,87km². Semenjak penghapusan kota administratif akibat berlakunya [UU Pemerintahan Daerah](#), berdasarkan PP no. 33/2003, penatalaksanaan kota Watampone dilakukan oleh Kabupaten Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan berpenduduk kurang lebih 700.000 jiwa (2000).

Kabupaten Bone adalah suatu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yaitu sejak adanya *ManurungngE Ri Matajang* pada awal abad XIV atau pada tahun 1330. *ManurungngE Ri Matajang* bergelar

MATA SILOMPO'E sebagai Raja Bone pertama memerintah pada Tahun 1330–1365. Selanjutnya digantikan Turunannya secara turun temurun hingga berakhir Kepada *H.ANDI MAPPANYUKKI* sebagai Raja Bone ke–32 dan ke–34.

Kabupaten Bone setelah lepas dari pemerintahan kerajaan, sampai saat ini tercatat 12 (dua belas) Kepala Daerah yang telah diberi kepercayaan untuk mengemban amanah pemerintahan di Kabupaten Bone. Mereka adalah:

1. Andi Pangeran Petta Rani

Kepala *Afdeling*/Kepala Daerah Tahun 1951 sampai dengan tanggal 19 Maret 1955.

2. Ma'Mun Daeng Mattiro

Kepala Daerah tanggal 19 Maret 1955 sampai dengan 21 Desember 1957.

3. H.Andi Mappanyukki

Kepala Daerah/ Raja Bone tanggal 21 Desember 1957 sampai dengan 1960.

4. Kol. H.Andi Suradi

Kepala Daerah tanggal 21 Mei 1960 sampai dengan 01 Agustus 1966.

5. Andi Baso Amir

Kepala Daerah Tanggal 02 Maret 1967 sampai dengan 18 Agustus 1970.

6. *Kol. H. Suaib*

Bupati tanggal 18 Agustus 1970 sampai dengan 13 Juli 1977.

7. *Kol.H.P.B.Harahap*

Bupati tanggal 13 Juli 1977 sampai dengan 22 Pebruari 1982.

8. *Kol.H.A.Made Alie*

PGS Bupati tanggal 22 Pebruari 1982 sampai dengan 6 April 1982
sampai dengan 28 Maret 1983.

9. *Kol.H.Andi Syamsul Alam*

Bupati tanggal 28 Maret 1983 sampai dengan 06 April 1988.

10. *Kol.H.Andi Sjamsul Alam*

Bupati tanggal 06 April 1988 sampai dengan 17 April 1993.

11. *Kol. H.Andi Amir*

Bupati tanggal 17 April 1993 Sampai 2003.

12. *H. A. Muh. Idris Galigo,SH*

Bupati selama dua periode, periode 2003-2008 dan periode
2008-2013

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan timur Indonesia. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Secara administratif Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan dan 333 desa dan 39 kelurahan, 893 Dusun dan 121 lingkungan, dimana Kabupaten Bone

merupakan pusat pengembangan wilayah timur Sulawesi Selatan. Sistem Pemerintah Daerah yang telah mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bupati Bone dalam mengemban tugas, pemerintahan dan pembangunan dibantu oleh perangkat Daerah dan lembaga teknis yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

4.2 Gambaran Umum DPD Golkar Bone

Golkar pasca munaslub 1998 adalah golkar dengan etos dan visi baru. Golkar dengan etos reformasi dan yang memandang demokrasi sebagai suatu keniscayaan. Golkar 'baru' ini karena didorong oleh bertemunya dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal, sesuai dan sejalan dengan Ikrar Panca Bhakti Golongan Karya, yang mengatakan bahwa jati diri golkar adalah sebagai kekuatan pembaru. Dengan demikian, etos pembaruan sejatinya merupakan sesuatu yang *inherent* dan *built in* dalam tubuh golkar. Berdasarkan perspektif ini, ke depannya golkar akan tetap memiliki komitmen dan bersikap konsisten terhadap ikrar tersebut, dengan senantiasa tetap mengaktualisasikan kepeloporan untuk pembaruan dan pembangunan sesuai dinamika zaman. Pembaruan golkar sekarang ini tidak lain merupakan implementasi dari ikrar tersebut. Sedangkan secara eksternal, lahirnya golkar dengan visi baru yang nantinya bernama Partai Golkar tidak lepas dari keberhasilan gerakan

reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 yang ditandai oleh terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Buah dari gerakan informasi ini adalah dilakukannya reformasi di segala bidang, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum.¹¹

Bertemunya dorongan internal dan tuntutan eksternal inilah yang meniscayakan tampilnya sebuah golkar visi baru dengan nama Partai Golkar. Dengan visi baru dengan semangat reformasi ini, golkar sama sekali bukan hanya sekedar ingin menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi sehingga terkesan defensif, juga bukan sekedar ingin merealisasikan pemutusan hubungan dengan masa lalu, melainkan karena golkar bertekad ingin menyertai serta mengarahkan jalannya reformasi, sehingga berlangsung dalam koridor knstitusi dan tidak salah arah. Golkar memandang bahwa reformasi di segala bidang itu harus merupakan proses evaluasi yang dipercepat, yakni secara gradual, terarah, dan konstitusional.

Beberapa langkah penting dan strategis telah, sedang, dan akan terus dilakukan golkar dalam rangka mengantarkan dan menyertai bangsa dan negara ini memasuki era baru dengan tetap berpegang teguh pada jati diri dan misi perjuangannya. Untuk mengawali itu semua, golkar sadar harus terlebih dahulu melakukan reformasi atas dirinya sendiri. Reformasi internal ini tampak dengan nyata ketika

¹¹ Akbar Tandjung. 1998. *Menuju Kelahiran Partai Golkar: Pokok-pokok Paradigma Baru*. Jakarta: DPP Partai Golkar, hal 2, 3

golkar menyelenggarakan Munaslub 1998. Sangat meyakinkan, Munaslub 1998 diselenggarakan sebagai respon atas tuntutan perubahan di segala bidang sebagai buah dari keberhasilan gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa Indonesia. Dalam konteks dan perspektif ini, Munaslub 1998 berlangsung dalam semangat reformasi dan pembaruan.lama dengan sejumlah pembaruan.

Pemrakarsa terbentuknya Golongan Karya di Kabupaten Bone, sekaligus sebagai Pengurus Golkar periode I, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua	:	H. A. Sebbu
Wakil Ketua	:	A. Baso Samad
Wakil Ketua	:	H. Djunaid Sulaeman
Sekretaris	:	Sutoto Danandjaya K
Wakil Sekretaris	:	H. Abd. Rahman

Periode I (1971-1978)

K e t u a	:	H. ANDI SEBBU
Sekretaris	:	SUTOTO DANANDJAYA K.

Periode I (1978-1983)

K e t u a	:	ANDI DADI
Sekretaris	:	ANDI PAGE
Bendahara	:	Dra. ROSDIANA HASYIM

Periode I (1983-1988)

K e t u a : H. ANDI PATTIKKENG
Sekretaris : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO
Bendahara : Drs. H. ANDI KAFRAWI R.

Periode I (1988-1993)

K e t u a : H. ANDI BACHTIAR
Sekretaris : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO
Bendahara : Drs. H. SAGGAF SALEH

Periode I (1993-1998)

K e t u a : H. ANDI HARUNI
Sekretaris : Ir. H. ANDI LANTARA PAWISEANG
Bendahara : H. ANDI MAPPASELING, BA

Periode I (1998-2004)

K e t u a : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO
Sekretaris : Drs. H. AMBO DALLE
Bendahara : H. ANDI MAPPASELING, BA

Periode I (2004-2009)

K e t u a : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO, SH
Sekretaris : Drs. H. AMBO DALLE, MM
Bendahara : Ir. H. IFRAYIM SUNUSI

Periode I (2009-2015)

K e t u a : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO, SH
Sekretaris : FIRMAN BATARI, SH, MH
Bendahara : Ir. H. IFRAYIM SUNUSI

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, melalui wawancara mendalam dengan segenap komponen yang terkait dengan judul penelitian ini. Penulis banyak mendapatkan data faktual mengenai dinamika penetapan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Bone. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

A. Proses penentuan calon bupati partai golkar

1. Proses penentuan bakal calon bupati

Sesuai amanat UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis, yang kemudian dalam aturan pelaksanaannya sesuai UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini memberikan tugas sekaligus tanggung jawab kepada partai politik, termasuk Partai Golkar, dalam rangka penetapan calon kepala daerah yang berkualitas sesuai kehendak rakyat.

Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluasluasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan transparan, serta wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Dengan demikian, setiap partai politik, termasuk partai golkar, wajib mempersiapkan tatacara dalam rangka penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai mekanisme internalnya, sehingga memenuhi amanat UU tentang pemerintah daerah.

2. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dari partai golkar adalah sebagai berikut:

a. Tahapan penjaringan bakal calon

Tahapan dilakukannya inventarisasi nama tokoh-tokoh sebagai bakal calon dan dilakukan survei awal terhadap mereka untuk kemudian dilakukan perkuatan terhadap salah seorang kader partai golkar yang paling berpeluang. Tahapan ini dilaksanakan sebelum proses rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari partai golkar. Bertujuan untuk mendapatkan calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang berasal dari kalangan kader partai golkar, dimana yang bersangkutan memiliki elektabilitas terbaik, sehingga partai golkar sangat berpeluang untuk memenangkan Pemilukada di

daerah tersebut, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Tahapan penjaringan nama-nama tokoh

Merupakan kegiatan inventarisasi nama-nama tokoh, baik dari kalangan kader internal maupun eksternal partai Golkar, yang diperkirakan memiliki peluang di daerahnya untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang dilakukan oleh DPP partai Golkar berdasarkan rekomendasi DPD partai Golkar provinsi dengan memperhatikan masukan dari DPD partai Golkar kabupaten/kota yang bersangkutan dan dilengkapi oleh konsultan/lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP partai Golkar untuk selanjutnya dilakukan survei elektabilitas terhadap mereka. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-13 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap survei awal

Merupakan kegiatan survei secara lengkap (kualitatif dan kuantitatif) dengan sampel sekurang-kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk oleh DPP partai Golkar terhadap beberapa nama tokoh yang telah dijangkau. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap seleksi bakal calon internal

Merupakan kegiatan pembahasan dan penentuan kader-kader partai Golkar yang memiliki peluang menang besar, yang dilakukan oleh DPP partai Golkar terhadap hasil survei awal. Diseleksi dari beberapa nama kader partai Golkar yang dinilai oleh DPP partai Golkar memiliki peluang untuk memenangkan Pemilu di daerah tersebut, dan kemudian dipilih beberapa orang diantaranya untuk dilakukan perkuatan elektabilitas. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

- Tahap perkuatan elektabilitas bakal calon

Merupakan kegiatan pendampingan konsultan politik terhadap kader-kader partai Golkar yang telah dipilih dalam proses seleksi, karena memiliki peluang menang yang besar, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan upaya secara lebih terarah dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya selama enam bulan, dimana DPP partai Golkar akan ikut melakukan kontribusi pendanaan sesuai perjanjian dengan kader-kader yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu H-11 bulan sampai dengan H-8 sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

- Tahap survei kedua

Merupakan kegiatan survei untuk evaluasi perkembangan

tingkat elektabilitas para tokoh/bakal calon tersebut, dengan sampel sekurang-kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk atau disetujui oleh DPP partai Golkar, dilengkapi dengan evaluasi perkembangan peluang kader-kader partai Golkar yang dipersiapkan, sejauh mana dapat memenangkan Pemilu. Ada kemungkinan dilakukan perubahan bakal calon yang akan diperkuat pada tahap lanjutan, apabila pada proses evaluasi dijumpai kemungkinan ada kader-kader partai Golkar lain yang lebih berpeluang daripada yang dipersiapkan semula. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-8 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

- Tahap perkuatan elektabilitas bakal calon lanjutan

Merupakan kegiatan pendampingan konsultasi politik terhadap kader-kader partai Golkar yang memiliki peluang menang yang besar sesuai hasil evaluasi survei kedua, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan upaya secara lebih terarah lagi dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya selama enam bulan berikutnya, dimana DPP partai Golkar akan ikut melakukan kontribusi pendanaan sesuai perjanjian dengan kader-kader yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu H-8 bulan sampai dengan H-6

bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

b. Tahapan penetapan pasangan calon

Tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang dilakukan oleh partai Golkar, untuk menghasilkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusulkan secara resmi oleh partai Golkar, dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap pendaftaran bakal calon

Merupakan kegiatan pendaftaran secara terbuka sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang berminat untuk mengikuti proses rekrutmen calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai Golkar, termasuk nama bakal calon yang telah dipersiapkan oleh DPP partai Golkar diarahkan untuk ikut mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

- Tahap verifikasi bakal calon

Merupakan kegiatan penelitian berkas administrasi persyaratan seluruh bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah mendaftarkan diri, oleh DPD partai Golkar di tingkatannya masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

- Tahap penetapan nominasi bakal calon

Merupakan kegiatan penentuan nominasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari seluruh bakal calon yang telah lolos verifikasi, dilakukan dalam rapat pleno dewan pimpinan daerah setempat, untuk selanjutnya ditetapkan dan disampaikan ke DPD partai Golkar. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-6 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap survei akhir

Merupakan kegiatan survei untuk penentuan bakal calon yang akan dipilih dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai Golkar, dengan sampel sekurang-kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk oleh DPP partai Golkar, terhadap nama-nama tokoh/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai perkembangan terakhir, termasuk di dalamnya seluruh nama nominasi bakal calon yang diusulkan oleh DPD partai Golkar yang bersangkutan, dimana kader partai Golkar yang telah dipersiapkan dalam tahap perkuatan bakal calon lanjutan ada di dalamnya. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-5 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap pemilihan dan penetapan calon terpilih

Merupakan kegiatan pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dilakukan dalam rapat tim pemilukada pusat, bersama dengan Ketua DPD partai Golkar yang bersangkutan, untuk menetapkan satu orang calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dari usulan nama hasil nominasi calon yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar yang bersangkutan, serta perkembangan hasil survei akhir. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap penentuan pasangan calon

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DPP partai Golkar bersama calon terpilih yang bersangkutan, untuk melengkapi pasangan calon terpilih menjadi pasangan calon resmi yang akan ditetapkan oleh DPP partai Golkar, dan dimungkinkan calon pasangannya ini adalah kader partai lain, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila calon terpilih dari partai Golkar adalah calon kepala daerah, maka akan dilakukan penetapan calon wakil kepala daerah berdasarkan hasil kompromi antara DPP partai Golkar dengan calon kepala daerah terpilih dari partai Golkar
- Apabila calon terpilih dari partai Golkar adalah calon wakil kepala daerah, maka akan dilakukan penetapan calon

kepala daerah berdasarkan hasil kompromi antara DPP partai golkar dengan calon wakil kepala daerah terpilih dari partai golkar.

Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilkada.

- Tahap pengesahan pasangan calon

Merupakan kegiatan pengesahan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah oleh DPP partai golkar, untuk selanjutnya menjadi calon resmi yang akan diusulkan oleh partai golkar atau oleh gabungan partai golkar dengan partai politik lain ke KPUD setempat. Apabila pasangan calon yang bersangkutan berasal dari kader partai lain, maka akan dilakukan perjanjian koalisi pasangan calon antara partai golkar dengan partai lain yang bersangkutan. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambarnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemiluada.

c. Tahapan pemenangan pasangan calon

Tahapan pemenangan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai golkar, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Tahap deklarasi pasangan calon

Merupakan kegiatan publikasi kepada masyarakat bahwa

pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah tersebut akan diusulkan oleh partai golkar dan partai-partai politik lain yang bergabung dalam Pemilukada di daerah tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap pembentukan tim dan persiapan kampanye

Merupakan kegiatan pembentukan tim kampanye, yang dilakukan oleh pasangan calon dan didukung sepenuhnya oleh partai golkar dan partai-partai lain yang bergabung. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk sosialisasi pasangan calon, sebelum jadwal kampanye resmi Pemilukada. Seperti kegiatan penggalangan pemilih, pencitraan melalui pembuatan baliho dan atribut kampanye lain serta pencitraan melalui media massa, penghimpunan dukungan logistic, penyiapan saksi, pengamanan suara, dll. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap penyiapan saksi

Merupakan kegiatan rekrutmen serta pembekalan saksi-saksi TPS, PPS, PPK, KPUD Kabupaten/kota dan KPUD provinsi, bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai golkar, termasuk penyiapan dana operasional bagi saksi-saksi tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rentan waktu H-3

sampai dengan H-1 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

- Tahap pendaftaran pasangan calon di KPUD

Merupakan kegiatan penyiapan administrasi untuk pendaftaran calon dan kegiatan pendaftaran resmi pasangan calon di KPUD. Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan pada H-2 bulan.

- Tahap pelaksanaan kampanye Pemilukada

Merupakan kegiatan resmi kampanye sebagai upaya untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya bagi kemenangan pasangan calon dari partai golkar, yang berakhir pada masa tenang. Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan H-1 bulan.

- Tahap pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan pemenang Pemilukada

Merupakan kegiatan pengamanan suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari H dan kegiatan rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat PPS, PPK, KPUD. Sejak hari H pemungutan suara sampai dengan hari penetapan pemenang Pemilukada. Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal tahapan Pemilukada yang ditetapkan, diperkirakan pada hari H sampai dengan H+2 bulan.

Pokok kegiatan dalam proses pemilihan calon kepala daerah dari partai golkar dilakukan dalam rangkaian kegiatan dan tahapan sebagai berikut:

a. Penjaringan bakal calon kepala daerah dari partai golkar dilakukan sebelum proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai golkar, yang berintikan upaya mendapatkan dan memperkuat bakal calon yang berasal dari kader partai golkar, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Penjaringan nama tokoh
2. Survei awal
3. Seleksi bakal calon internal
4. Perkuatan elektabilitas bakal calon partai golkar
5. Survei kedua
6. Perkuatan elektabilitas lanjutan bakal calon partai golkar.

b. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai golkar, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran bakal calon
2. Verifikasi bakal calon
3. Penetapan nominasi bakal calon
4. Survei akhir
5. Pemilihan dan penetapan calon terpilih
6. Penentuan pasangan calon
7. Pengesahan pasangan calon

- c. Pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai golkar, yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut:
1. Deklarasi pasangan calon
 2. Pembentukan tim dan persiapan kampanye
 3. Penyiapan saksi-saksi pemilukada
 4. Pendaftaran pasangan calon ke KPUD
 5. Pelaksanaan kampanye pemilukada
 6. Pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan pemenang pemilukada.

Adapun persyaratan khusus untuk kelengkapan berkas bakal calon bupati Bone dari partai golkar pada pemilukada tahun 2013:

- a. Surat pernyataan bersedia untuk dicalonkan sebagai Bupati Bone dari Partai Golkar periode 2013-2018 pada pemilukada tahun 2013.
- b. Surat pernyataan sanggup untuk tidak mengundurkan diri sebagai calon bupati bone dari Partai Golkar pada pemilukada tahun 2013.
- c. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diduduki, apabila nantinya terpilih menjadi Bupati Bone periode 2013-2018 sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil /

Anggota TNI/Polri, jika terpilih menjadi Bupati Bone pada pemilukada tahun 2013.

- e. Surat pernyataan sanggup untuk non aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bone.
- f. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bone pada pemilukada tahun 2013.
- g. Surat pernyataan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai tim pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone periode 2013-2018.
- h. Surat pernyataan:
 - Bersedia dan sanggup untuk mendukung dan memenangkan calon bupati bone yang ditetapkan dan diusulkan oleh partai golkar dalam pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone pada tahun 2013.
 - Bersedia untuk tidak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati Bone oleh partai atau koalisi partai lain pada pemilukada Bone tahun 2013.
 - Bersedia dan sanggup untuk tidak menjadi tim kampanye atau mengkampanyekan calon bupati/wakil bupati Bone dari partai atau koalisi partai lain pada pemilukada Bone tahun 2013.

3. Komposisi dan personalia tim pemilukada

Berdasarkan surat keputusan: Kep-04/DPD-II/GOLKAR/V/2012 tentang perubahan surat keputusan: KEP-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012 tentang komposisi dan personalia tim pemilukada bupati/wakil bupati kabupaten bone periode 2013-2018.

Ketua : H. Andi Muh. Idris Galigo, SH

Wakil Ketua : H. A. Amin Sukma

Ketua Harian : Drs. A. Muh. Amin, MH

Sekretaris : A. Irwansyah, S.Sos

Bendahara : Ir. Hj. Humaerah

Anggota : H. A. Ichlas Siradju

H. A. Arfan Idris Galigo, SH, M.Kn

Dra. Hj. Rosnaeni As Darma

Hj. A. Irma Alisyahbana, S.Sos

Dra. A. Sukmawati

A. Emil Mattotorang, SE

A. Muskamal Bare, S.Pd

Ir. Hariman

Mahmud, SH

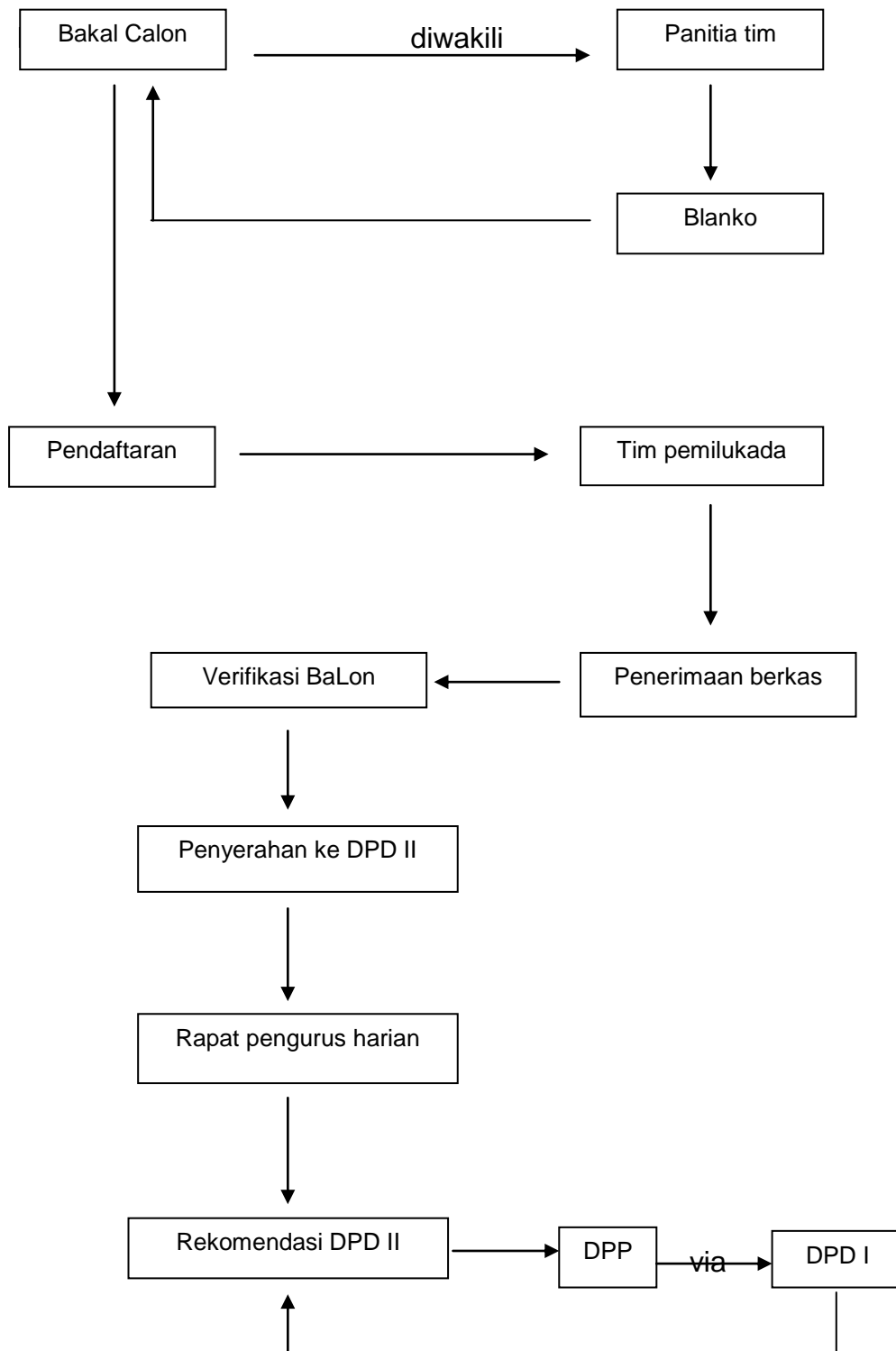
A. Farida Jabbar

A. Nursiha Nur, SE

Drs. A. R. Sutanto

B. Proses Penetapan A. Fahsar Padjalangi menjadi Calon Bupati dari Partai Golkar

Mekanisme penetapan



C. Nama-nama Pendaftar Bakal Calon Bupati dari Partai Golkar

Berdasarkan data dari tim pemilukada Golkar Bone 2013, ada dua belas orang pendaftar untuk menjadi bakal calon bupati dari partai Golkar, mereka adalah:

- Drs. Sulaeman Rapi, M.Si
- Drs. H. A. Fahsar M. Padjalangi, M.Si
- Drs. H. Ambo Dalle, MM
- Drs. H. A. Mangunsidi, M.Si
- Drs. A. Sultan Pawi, M.Si
- A. Yuslim Patawari, ST, M.Si
- Imran Tenritatta Amin Syam, SE
- Drs. A. Akbar Yahya, MM
- Drs. H. Taswin Arifin
- H. A. Irsan Idris Galigo, ST, MM
- H. A. Taufan Tiro, ST, MM
- Drs. H. Arifuddin Fattah, M.Pd

Berdasarkan informasi dari Kepala Kesekretariatan DPD II Golkar Bone, dari dua belas orang ini, hanya sembilan orang yang mengembalikan formulir pendaftaran.

Penetapan A. Fahsar Padjalangi menjadi calon bupati dari partai Golkar ditentukan dalam rapat yang diadakan di DPP Partai Golkar, yang bertempat di Jakarta. Ketika penulis menanyakan tentang bagaimana situasi pada saat rapat penetapan berlangsung, mengingat

adanya dua calon yang dijagokan saat itu, A. Akbar Yahya, yang juga hadir pada saat dilaksanakannya rapat, meski tidak masuk dalam ruang rapat, memberi pemaparan singkat.

“situasi rapat tertutup, hanya dihadiri oleh tim pemilukada dan diwakili oleh DPD I Partai Golkar”.

Beliau juga menambahkan bahwa yang terlibat dalam rapat penetapan tersebut adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Menurutnya, situasi pada saat itu tidak ada persoalan, karena prosesnya memang panjang dan sudah sesuai mekanisme. Sehubungan dengan keputusan yang telah diambil saat rapat, beliau berujar,

”memang ada beberapa pihak yang kecewa, namun hal tersebut tidak menghambat keputusan”.

Menurut kabar yang beredar, memang ada beberapa pihak yang kecewa ketika A. Fahsar Padjalangi, menurut keputusan rapat, dipilih menjadi bakal calon bupati dari partai Golkar. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat rapat berlangsung, A. Irwansyah memberi pemaparan yang sedikit lebih rinci dari pemaparan A. Akbar Yahya.

“terjadi tarik-menarik dan rapat berlangsung alot. Karena dasar DPD mengajukan ke pusat berdasarkan survei internal partai, yang mempersiapkan A. Irsan, namun DPP mengandalkan survei eksternal”.

Seperti yang dikemukakan A. Akbar, rapat berlangsung tertutup, hanya diikuti tim pemilukada pusat, dan dari provinsi diwakili oleh A. Muh. Rum dan A. Muh. Arfan Idris dari DPD I Partai Golkar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan A. Irwansyah, yang merupakan kepala kesekretariatan DPD II partai golkar, yang juga adalah wakil sekretaris DPD, sekretaris bidang kemenangan pemilu, dan sekretaris lembaga kemenangan pemilu, penetapan A. Fahsar sebagai bakal calon dari partai golkar salah satunya adalah berdasarkan hasil survei. Berdasarkan penjelasannya, hal tersebut ditentukan setelah melihat dan memperhatikan hasil survei, yang dilakukan sebanyak tiga kali, menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Beliau juga menyebutkan bahwa dahulu A. Fahsar merupakan kader golkar. Namun ketika berbenturan pada aturan netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), A. Fahsar tetap memilih menjadi pegawai negeri sipil daripada tetap menjadi kader Golkar. Berikut pemaparan A. Irwansyah sehubungan dengan hal ini.

“penyebab alotnya rapat yang pertama adalah dasar kita disini (DPD Partai Golkar) mengajukan ke pusat itu didasari survei internal dan mempersiapkan A. Irsan. Pada satu sisi, DPP mengandalkan survei eksternal”

Adapun menurut A. Akbar Yahya, yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas ketua DPD partai golkar, pemilihan bakal calon tersebut dilihat dari kemauan dan kebutuhan masyarakat,

dedikasi dan kompetensi yang dimiliki, serta kecakapan, dan tentu saja sesuai persyaratan menjadi seorang pemimpin. Beliau menambahkan bahwa setiap kader harus menerima setiap keputusan yang telah ditetapkan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh A. Irwansyah, beliau mengatakan bahwa memang ada perbedaan antara rencana awal dengan apa yang harus dihadapi.

“memang ketika itu kita kerja berat karena berbeda rencana awal dengan apa yang harus kita hadapi, tetapi dengan kebesaran jiwa dan loyalitas sebagai kader, ini yang menjadi pijakan, menjadi prinsip bahwa apapun keputusan partai, sebagai kader harus menerima, kalau tidak mau menerima, keluar”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan A.Irwansyah, disebutkan bahwa alasan tidak ditetapkannya A. Irsan Idris Galigo, yang biasanya disapa A.Cicang, sebagai bakal calon bupati dari partai golkar adalah karena dari beberapa kali survei, tren peningkatannya tidak lebih signifikan dari A. Fahsar. Karena menurut beliau, tidak akan dicalonkan jika yang bersangkutan tidak menang menurut survei.

Tetap tidak bisa dipungkiri bahwa karena hal tersebut, gesekan internal partai tidak dapat dihindari. A. Cicang yang merupakan anak kandung dari A. Idris Galigo yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPD partai Golkar, tentu memiliki pendukung yang loyal, terbukti dengan beralihnya beberapa pengurus dan kader partai ke tim kemenangan A. Cicang. Dan kemudian akhirnya A. Irsan Idris Galigo memutuskan untuk maju dari jalur independen. Seperti yang dikemukakan A. Irwansyah pada penulis pada saat wawancara,

“yang tidak bisa dihindari, gesekan itu jelas ada, dimana ketika itu ketua DPD Partai Golkar Kab.Bone, yang notabene ayah kandungnya A. Irsan. Tentu pak A. Idris Galigo memiliki pendukung, memiliki loyalitas, dan itu terbukti dengan beralihnya beberapa pengurus DPD II, pengurus partai, dan kader ke tim kemenangan ‘ACC’”

Awalnya DPP Partai Golkar mempersiapkan A. Cicang untuk menjadi bakal calon bupati dari partai Golkar, berdasarkan hasil survei internal. Diusulkan sebagai calon yang dipersiapkan, sesuai juklak, yang tetap mengutamakan kader partai Golkar untuk maju menjadi kepala daerah, dengan tujuan untuk memudahkan konsolidasi dan agar bersinergi dengan infrastruktur partai. Dari sini timbul pertanyaan dari penulis, mengapa dari awal bukan A. Fahsar yang diusulkan. Berikut jawaban dari A. Irwansyah,

“kalau pertanyaannya adalah kenapa memang bukan A. Fahsar yang dari awal dipersiapkan, pertama, dasarnya, partai golkar mengutamakan kader, yang sementara aktif. A. Irsan kan adalah kader potensial partai golkar ketika itu, beliau sementara melaksanakan penugasan partai sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi selatan. Kedua, aspirasi dari pengurus-pengurus itu mendukung A. Irsan untuk dicalonkan dari partai golkar.”

Dan dari jawaban A. Irwansyah diketahui bahwa hal ini karena pada pemilu pada lalu beliau melawan putusan partai, tepatnya pada pemilu pada 2008, ketika beliau memutuskan untuk tidak lagi menjadi wakil mendampingi A. Idris Galigo, dan memutuskan untuk maju melalui gabungan koalisi partai.

Pada dasarnya, partai golkar mengutamakan kader yang sementara aktif. Hal ini sehubungan dengan penjelasan A. Irwansyah, ketika penulis menanyakan tentang tujuan disarankannya A. Irsan ke DPP.

“diusulkan sebagai calon yang dipersiapkan, karena memang di petunjuk pelaksanaan, juklak no.13 itu dikatakan bahwa, agar DPD kabupaten/kota setempat untuk menyiapkan calon. Untuk memudahkan konsolidasi, itu memang supaya bersinergi dengan infrastruktur partai golkar.”

Namun DPP mengandalkan survei eksternal yang lebih mengarah pada A. Fahsar. A. Akbar Yahya, pelaksana tugas ketua setelah mundurnya A. Idris Galigo, menegaskan bahwa alasan penetapan tidak berkaitan dengan hubungan kekeluargaan.

Hal ini bertolak belakang dengan pemaparan seorang tim sukses ‘Tafaddal’, yang namanya tidak ingin disebutkan dalam tulisan ini. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya memang ada persaingan kepentingan antara Nurdin Halid dari kubu ‘Tafaddal’, yang menjabat sebagai Ketua Bappilu Golkar wilayah Sulawesi selatan, dengan Idris Galigo dari kubu ‘ACC’, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar Bone, Bupati Bone, sekaligus sebagai ayah dari A. Irsan Idris.

Disebutkan bahwa kepentingan Idris Galigo sehubungan dengan niatnya untuk mengamankan kebijakan-kebijakannya yang disinyalir tidak sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu. Adapun Nurdin Halid, yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ambo Dalle, wakil dari A. Fahsar, ini disebutkan bahwa kepentingannya sehubungan dengan

banyaknya keluarga beliau yang ingin maju menjadi calon legislative. Saat ini A. Fahsar Padjalangi dicanangkan menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Bone, dengan demikian jalan untuk memasukkan keluarga menjadi calon legislatif menjadi terbuka lebar. Penetapan A. Fahsar sebagai calon bupati dari partai Golkar juga berhubungan dengan jabatan Ambo Dalle yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPRD, dengan demikian jaringannya di daerah lebih kuat, sehingga mampu menjaring massa untuk memilih.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil dari penelitian ini, mengenai bagaimana proses dan dinamika yang terjadi dalam pengambilan keputusan penetapan calon bupati dari partai golkar di Kabupaten Bone. Yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

- A. Sebelum penentuan dilakukan, ada proses yang disebut penjaringan, dimana di dalamnya dilaksanakan proses seleksi bakal calon internal. Proses-proses ini dilaksanakan oleh tim pemilukada kabupaten, merekrut semua bakal calon yang potensial. Sesuai mekanisme partai, penetapan dilakukan lembaga survei yang ditunjuk oleh DPP. Yang terlibat dalam proses penetapan ini adalah ketua, sekretaris DPP, dan badan pemenangan pemilu DPP. Selebihnya bisa diundang jika dibutuhkan.
- B. Penetapan A. Fahsar Padjalangi ini didasarkan pada keputusan DPP Partai Golkar yang berpatokan pada hasil survei dari lembaga survei yang telah ditunjuk. Selain itu pertimbangan lain juga didasarkan pada kemauan masyarakat dan kecakapan calon yang bersangkutan.
- C. Tidak ditetapkannya A. Irsan Idris kembali lagi kepada keputusan DPP yang bersandar pada keputusan lembaga survei, yang hasilnya

tidak lebih tinggi dari A. Fahsar. Selain itu masyarakat juga tidak sedikit yang belum yakin pada kinerja kader muda nantinya ketika menjabat.

D. Dalam proses penetapan ternyata memang ada persaingan kepentingan antara orang-orang yang berada di balik dua kubu tersebut.

B. Saran

Perlu dipahami, bahwasanya setiap bakal calon yang mendaftar di suatu partai memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Bagaimanapun sosialisasi harus tetap terjalin. Tidak hanya memperdulikan segala bentuk kegiatan yang menyangkut kampanye dan pemilihan umum. Dengan menyadari pandangan tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini:

1. Objek yang di teliti dalam skripsi ini adalah manusia dan caranya mengambil keputusan serta kepentingan yang berada dibalik penetapan suatu keputusan. Penelitian mengenai proses ditetapkannya seorang figur sebagai wakil partai untuk memimpin suatu wilayah ini, ada baiknya diteliti atau diuji kebenarannya secara berkala dan berkelanjutan.
2. Masyarakat sebaiknya mengerti sebelum memilih, sehingga mendorong terwujudnya tatanan nilai kearifan yang berorientasi lokal dan sesuai dengan cita-cita demokratisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Edwin, Donni, dkk. 2005. *Pilkada Langsung: Demokratisasi daerah dan Mitos Good Governance*. Jakarta: Partnership.

Kaelola, Akbar. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.

Liliawati, Eugenia. 1999. *Undang-undang Politik beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Harvarindo.

Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka.

Marsh, David dan Stoker, Gerry. 2011. *Teori dan Metode dalam Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.

Sitepu, Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tandjung, Akbar. 1998. *Menuju Kelahiran Partai Golkar: Pokok-pokok Paradigma Baru*. Jakarta: DPP Partai Golkar.

Usman, Husnaini dan Setiady, Purnomo. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Website

Andi Pamelleri. Pdf. Riwayat Kabupaten Bone Asal Usul Sejarah (diakses 10 Maret 2012)

<http://glosarium.yn.lt/arti/?k=dinamika> (diakses 20 Juni 2013)

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/pemilukada_68.pdf (diakses 20 Juni 2013)

Sumber lain

- Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: Juklak- 13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang perubahan Juklak -02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang tata cara pemilihan umum kepala daerah dari partai golongan karya.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor:06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BONE MASA BAKTI 2009 - 2015

NO	N A M A	JABATAN
1	H. A. Muh. Idris Galigo, SH	Ketua
2	Drs. H. Ambo Dalle, MM	Wakil Ketua
3	Drs. A. Akbar Yahya, MM	Wakil Ketua
4	Drs. Salim Said	Wakil Ketua
5	H. A. M. Arfan, SH, M.Knot	Wakil Ketua
6	H. A. Ikbal Amal, S.Sos	Wakil Ketua
7	H. Andi Ichlas Siraju	Wakil Ketua
8	Drs. H. Anwar Tayeb, M.Si	Wakil Ketua
9	Ir. H. Samsuddin Yusuf, MM	Wakil Ketua
10	H. A. Amin Sukma	Wakil Ketua
11	A. Sinar L, S.Sos	Wakil Ketua
12	Drs. H. Zulkifli Ayub	Wakil Ketua
13	Bobbi Alimuddin Page	Wakil Ketua
14	Ir. H. Tajuddin	Wakil Ketua
15	Firman Batari, SH, MH	Sekretaris
16	A. Irwansyah, S.Sos	Wakil Sekretaris
17	A. Emil Mattottorang, SE	Wakil Sekretaris
18	Hj. A. Irma Alisyahbana, S.Sos	Wakil Sekretaris
19	Mustamin Paspas, S.Sos	Wakil Sekretaris

20	Ir. A. Aldi Burhanuddin	Wakil Sekretaris
21	A. Muskamal Bare, S.Pd	Wakil Sekretaris
22	Ir. Hariman	Wakil Sekretaris
23	Abd. Razak, ST	Wakil Sekretaris
24	Mahmud, SH	Wakil Sekretaris
25	Andi Farida Jabbar	Wakil Sekretaris
26	Irwandi Burhan, SE, M.Si	Wakil Sekretaris
27	Ir. A. Arfan Gazali	Wakil Sekretaris
28	Ir. Kasmir	Wakil Sekretaris
29	Ir. H. Ifrayim Sanusi	Bendahara
30	Dra. Hj. Rosnaeni Surya Darma	Wakil Bendahara
31	Dra. Hj. A. Annisari Moestafa	Wakil Bendahara
32	H. Marzuki	Wakil Bendahara
33	Hendrik Tjuandi	Wakil Bendahara
34	Hasriani Haruna, SE	Wakil Bendahara
35	Hj. A. Indrawati Syamsul	Wakil Bendahara
36	H. Amir Bandu	Wakil Bendahara
37	H. A. Ahmad Anshari, SE	Wakil Bendahara
38	Hj. Ervinna Udhin	Wakil Bendahara
39	Andi Rimadhani	Wakil Bendahara
40	Hj. Syamsidar Ridwan	Wakil Bendahara
41	Hj. A. Jauhari Maskul	Wakil Bendahara

42	Hj. Aisyah Saleh	Wakil Bendahara
43	Drs. H. A. Haekal	Bagian Pemenangan Pemilu
44	A. Nursiha Nur, SE	Bagian Pemenangan Pemilu
45	A. Hasbi Arjan	Bagian Pemenangan Pemilu
46	H. A. Zainal Sumange Alam	Bagian Pemenangan Pemilu
47	Drs. A. Saenal Abidin	Bagian Pemenangan Pemilu
48	Ir. Pausia P.	Bagian Pemenangan Pemilu
49	Kasman Galib, SE	Bagian Organisasi
50	Burhanuddin Natsir, SE	Bagian Organisasi
51	A. Baso Manajeng	Bagian Organisasi
52	Muh. Asry Hadi, SE	Bagian Organisasi
53	Andi Sutanto	Bagian Organisasi
54	A. Savina Sirman	Bagian Organisasi
55	H. Salim Hari	Bagian Organisasi
56	Ir. A. Mihwar	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
57	H. Muh. Ramli, SE	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
58	A. Palesangi Yatim, S.Sos	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
59	Sudirman, SH	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
60	A. Neneng Triana	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
61	Andi Ira Faradiba, SPT	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
62	A. Darwin Hamzah	Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
63	Hj. A. Ulfana Promal Pawi	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni

64	A. Akmal	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni
65	H. Marjuni	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni
66	Sofyan Alimuddin Page	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni
67	Sultan	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni
68	Bruzli Yusuf	Bagian Pemuda, Olahraga, dan Seni
69	Dra. A. Sukmawati	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
70	Drs. Akmal Jafar	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
71	A. Romy Terwo	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
72	Syamsul Bahri, SE	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
73	A. Satria Eka Dahlan	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
74	Sul Hamzah	Bagian Pendidikan dan Pelatihan
75	Drs. Abul Khaer	Bagian Pengabdian Masyarakat
76	Hj. Herniaty Tjangkina, SKM	Bagian Pengabdian Masyarakat
77	H. Rusli	Bagian Pengabdian Masyarakat
78	Murni Kinas, SH	Bagian Pengabdian Masyarakat
79	Zainuddin	Bagian Pengabdian Masyarakat
80	H. Ahmad	Bagian Pengabdian Masyarakat
81	Syahrir, SE	Bagian Pengabdian Masyarakat
82	H. Jamaluddin Sabba, SH	Bagian Hukum dan HAM
83	A. Burhanuddin, SE	Bagian Hukum dan HAM
84	Rahmawati Rahman, SH	Bagian Hukum dan HAM
85	H. Sumitro	Bagian Hukum dan HAM

86	A. Sudi Alam, SH	Bagian Hukum dan HAM
87	Sunding	Bagian Hukum dan HAM
88	Abdul Muin	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
89	Syamsul Rijal	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
90	Sam Sumarlin	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
91	H. Umar	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
92	A. Awaluddin	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
93	Rukman T	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
94	Andi Unru	Bagian Tani dan Nelayan
95	Andi Hamka	Bagian Tani dan Nelayan
96	Muh. Jusli	Bagian Tani dan Nelayan
97	A. Hafsah Taufiq	Bagian Tani dan Nelayan
98	Aksan	Bagian Tani dan Nelayan
99	Hibbu Lattu	Bagian Tani dan Nelayan
100	Ir. Humaerah	Bagian Perempuan
101	Dra. Hj. Hasbiah	Bagian Perempuan
102	Hj. St. Maryam	Bagian Perempuan
103	A. Tenri Angka	Bagian Perempuan
104	Hj. Kurnia	Bagian Perempuan
105	Rasdiana	Bagian Perempuan
106	A. M. Zaidil, SE	Bagian Informasi dan Komunikasi
107	Abdul Mannang	Bagian Informasi dan Komunikasi

108	A. Eva Faulia Tenriawaru BP, SE	Bagian Informasi dan Komunikasi
109	Bambang Irianto	Bagian Informasi dan Komunikasi
110	Ummi Kalsum, SH	Bagian Informasi dan Komunikasi
111	Sugianto, SE	Bagian Informasi dan Komunikasi
112	Heri Arsyad	Bagian Informasi dan Komunikasi
113	Ir. Halim Laga	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
114	A. Amar Ma'ruf	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
115	Pahrudin Hanafing	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
116	Hj. Mahditiara, SE	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
117	Jumhur Tabrani, SE	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
118	Rudding Tokkong	Bagian Kerjasama Organisasi Kemasyarakatan
119	Darwis Alhajji, SH	Bagian Keagamaan
120	Hj. Nurmiaty, SE	Bagian Keagamaan
121	Hasanuddin	Bagian Keagamaan
122	H. M. Ridwan	Bagian Keagamaan
123	Podang, B.Sc	Bagian Keagamaan
124	Nur Alam	Bagian Keagamaan

http://golcarsulsel.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=149/130413



DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I
PARTAI GOLKAR
SULAWESI SELATAN

Sekretariat : Jl. Amenagapya No. 2 Telp. (0411) 331125 Hunting Fax. (0411) 323021 Makassar

Nomor : 126 /DPD-IPG/X/2012

Makassar, 24 Oktober 2012

Sifat : Penting

Perihal : Penyampaian / Edaran

Kepada Yang Terhormat,
Ketua DPD Partai GOLKAR
Kabupaten / Kota se Sulsel
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menjelang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati/Kota maka dengan ini kami instruksikan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten/ Kota agar merujuk pada mekanisme Partai Golkar yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar melalui Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : JUKLAK-13 /DPP/GOLKAR/XI/2011 tentang Perubahan JUKLAK-02/DPP /GOLKAR/X /2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya.

Untuk itu diharapkan kepada DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan untuk menyampaikan kepada Pengurus, Anggota Fraksi Partai Golkar dan kader-kadernya agar mematuhi :

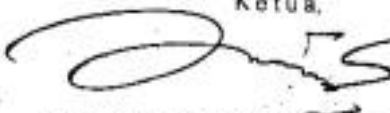
1. Tidak Mencalonkan diri dari partai lain atau perseorangan (independent) kecuali yang telah ditetapkan oleh Pasangan Calon yang diusulkan Partai Golkar.
2. Tidak Mengkampanyekan atau mengikuti kampanye atau kegiatan apa saja dari pasangan lain yang bukan usulan dan ditetapkan Partai Golkar.
3. Apabila ada pengurus / kader dan atau Anggota Fraksi Partai Golkar yang melanggar aturan tersebut diharapkan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Sulsel untuk mengidentifikasi dan memberikan bukti-bukti terkait kegiatan yang bersangkutan untuk disampaikan ke DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan untuk diambil tindakan organisasi sebagaimana mestinya.

Demikian penyampaian dan himbauan kami untuk dilaksanakan

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua,

Sekretaris,


DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH. M.S.
NPAG.20180000007


H. PANGERANG RAHMAT
NPAG.20090000066

Tembusan :

1. Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta di Jakarta
2. Ketua Pemenangan Pemilu Korwil Sulawesi di Jakarta
3. Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar di Jakarta
4. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar di Jakarta



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Sekretariat : Jl. Besse Kajua No.36 Telp./Faks. 0481-25433 Watampone 92732

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012

T e n t a n g

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
PERIODE 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone periode 2013-2018;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;
2. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 Nomor VII/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Program Umum Partai GOLKAR;
3. Surat Keputusan DPD I Partai GOLKAR Prop. Sulawesi Selatan Nomor : KEP-M.16/SK/DPD-I/PG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kab. Bone;
4. JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tanggal 5 November 2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya.
- Memperhatikan** : Pendapat dan Saran yang dikemukakan dalam Rapat Pleno diperluas Pengurus DPD Partai GOLKAR Kab. Bone pada tanggal 10 April 2012;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BONE TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

- PERTAMA** : Mengesahkan Komposisi dan Personalia Tim Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 11 April 2012

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Ketua,


H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH
NPAPG 23130000001

Sekretaris,




H. FIRMAN BATARI, SH, MH
NPAPG 23130000015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPD Partai GOLKAR Prop.Sul-Sel
2. Yth. Ketua Tim Pemilukada Prop.Sul-Sel
3. Arsip,-

di Makassar
di Makassar

Lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012
Tentang
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
PERIODE 2013-2018

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
PERIODE 2013-2018

Ketua : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO, SH
Wakil Ketua : Drs. A. AKBAR YAHYA, MM.
Ketua Harian : H. FIRMAN BATARI, SH, MH.
Sekretaris : A. IRWANSYAH, S.Sos
Bendahara : Ir. H. IFRAYIM SUNUSI
Anggota : - H. A. IKBAL AMAL, S.Sos
- H. A. ICHLAS SIRADJU
- H. A. ARFAN IDRIS GALIGO, SH, M.Kn.
- H. A. AMIN SUKMA, SE
- Dra. A. SINAR AL, S.Sos
- Dra. Hj. ROSNAENI AS DARMA
- Hj. A. IRMA ALISYAHBANA, S.Sos
- Ir. Hj. HUMAERAH
- Drs. A. MUH. AMIN, MH.
- A. EMIL MATTOTORANG, SE
- A. MUSKAMAL BARE, S.Pd
- Ir. HARIMAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE

Ketua, Sekretaris,

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH **H. FIRMAN BATARI, SH, MH**
NPAPG 23130000001 NPAPG 23130000015





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Sekretariat : Jl. Buntu Kajuara No.36 Telp./Faks. 0481-25433 46/0481-92732

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Kep-04/DPD-II/GOLKAR/V/2012

Tentang

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan pelaksanaan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone periode 2013-2018;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Bone;
- Mengingat** : 1. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 Nomor VI/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;
2. Keputusan MUNAS VIII Partai GOLKAR Tahun 2009 Nomor VII/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Program Umum Partai GOLKAR;
3. Surat Keputusan DPD I Partai GOLKAR Prop. Sulawesi Selatan Nomor : KEP-M.16/SK/DPD-I/PG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai GOLKAR Kab. Bone;
4. JUKLAK-13/DPP/GOLKAR/XI/2011 tanggal 5 November 2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai Golongan Karya.
- Memperhatikan** : Pendapat dan Saran yang dikemukakan dalam Rapat Pengurus Harian DPD Partai GOLKAR Kab. Bone pada tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018**

- PERTAMA : Mengesahkan Komposisi dan Personalis Tim Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 1 Mei 2012

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Ketua


H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH
NPAPG 23130000001



Sekretaris,


H. FIRMAN BATARI, SH, MH
NPAPG 23130000015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPD Partai GOLKAR Prop.Sul-Sel
2. Yth. Ketua Tim Pemilukada Prop.Sul-Sel
3. Arsip,-

di Makassar
di Makassar

Lampiran Surat Keputusan Nomor : Kep-04/DPD-II/GOLKAR/V/2012

Tentang

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP-03/DPD-II/GOLKAR/IV/2012 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
TIM PEMILUKADA BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE
PERIODE 2013-2018**

Ketua : H. ANDI MUH. IDRIS GALIGO, SH
Wakil Ketua : H. A. AMIN SUKMA
Ketua Harian : Drs. A. MUH. AMIN, MH.
Sekretaris : A. IRWANSYAH, S.Sos
Bendahara : Ir. Hj. HUMAERAH
Anggota :
- H. A. ICHLAS SIRADJU
- H. A. ARFAN IDRIS GALIGO, SH, M.Kn.
- Dra. Hj. ROSNAENI AS DARMA
- Hj. A. IRMA ALISYAHBANA, S.Sos
- Dra. A. SUKMAWATI
- A. EMIL MATTOTORANG, SE
- A. MUSKAMAL BARE, S.Pd
- Ir. HARIMAN
- MAHMUD, SH
- A. FARIDA JABBAR
- A. NURSIHA NUR, SE
- Drs. A.R.SUTANTO

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Ketua, Sekretaris,

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, SH **H. FIRMAN BATARI, SH, MH**
NPAPG 23130000001 NPAPG 23130000015

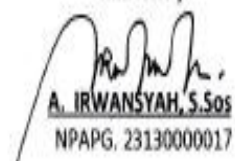
**JADWAL PENDAFTARAN
BAKAL CALON BUPATI DARI PARTAI GOLKAR
PERIODE 2013 – 2018**

No.	NAMA LENGKAP	HARI / TANGGAL	J A M	KETERANGAN
1.	Drs. SULAEMAN RAPI, M.Si	MINGGU/15-04-2012	15.45	
2.	Drs.H.A.FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si	SENIN/16-04-2012	10.35	
3.	Drs. H. AMBO DALLE, MM.	SENIN/16-04-2012	11.10	
4.	Drs. H. A. MANGUNSIDO, M.Si	RABU/18-04-2012	09.00 – 10.00	
5.	Drs. A. SULTAN PAWI, M.Si	RABU/18-04-2012	10.00 – 11.00	
6.	A. YUSLIM PATAWARI, ST, M.Si	RABU/18-04-2012	12.00 – 13.00	
7.	IMRAN TENRITATTA AMIN SYAM, SE	RABU/18-04-2012	13.00 – 14.00	
8.	Drs. A. AKBAR YAHYA, MM.	RABU/18-04-2012	14.00 – 14.45	
9.	Drs. H. TASWIN ARIFIN	RABU/18-04-2012	14.45 – 15.15	
10.	H.A.IRSAN IDRIS GALIGO, ST, MM.	RABU/18-04-2012	15.15 – 16.00	
11.	H.A.TAUFAN TIRO, ST, MM.	RABU/18-04-2012		
12.	Drs. H. AFIFUDDIN FATTAH, M.Pd.	RABU/18-04-2012		

Watampone, April 2012

TIM PEMILUKADA PARTAI GOLKAR

Sekretaris,


A. IRWANSYAH, S.Sos
 NPAPG. 23130000017



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor : R-361 /GOLKAR/V/2012
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Pengesahan pasangan calon Kepala
Daerah Kabupaten Bone

Jakarta, 31 Mei 2012

Kepada Yth.

Ketua DPD Partai GOLKAR
Kabupaten Bone
di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan :

1. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : Juklak-13/DPP/ GOLKAR/XI/2011 tertanggal 15 November 2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dari Partai GOLKAR.
 2. Hasil Keputusan Rapat Tim Pilkada Pusat tanggal 22 Mei 2012 yang membahas pemilihan dan penetapan calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Pilkada Pusat.
 3. Surat DPP Partai GOLKAR Nomor : B-639/GOLKAR/IV/2012 tertanggal 22 Mei 2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat Tim Pilkada Pusat untuk Penetapan calon Kepala Daerah Kabupaten Bone.
 4. Surat dari Sdr. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone yang ditetapkan Partai GOLKAR tertanggal 23 Mei 2012 Perihal Usulan 3 (tiga) nama calon Wakil Bupati Kabupaten Bone.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menetapkan dan mengesahkan:
Sdr. ANDI FAHSAR MAHDIN PADJALANGI sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. Drs. H. AMBO DALLE, MM sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone.


Dinstruksikan kepada Saudara Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Bone untuk :

1. Menindaklanjuti keputusan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan pertundang-undangan yang berlaku.

2. Mendaftarkan calon yang sudah ditetapkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/ Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai GOLKAR.
4. Segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Umum


ABURIZAL BAKRIE



Sekretaris Jenderal


IDRUS MARHAM

Tembusan Yth

1. Wakil-wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR
2. Ketua Bidang PP Wilayah Sulawesi DPP Partai GOLKAR
3. Ketua Bidang Organisasi dan Daerah
4. Bendahara DPP Partai GOLKAR
5. DPD Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE**

Sekretariat : Jalan Besse Kajiwira No. 35 Tlp./Faks. 0481-25433 Watampone 92732

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN BONE
Nomor : Kep-014/DPD-II/PG/BN/VII/2012**

Tentang

**PENETAPAN Drs. H.A. FAHSAR MAHDIN PAJALANGI, M.Si.
DAN Drs. H. AMBO DALLE, MM. SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BONE DARI PARTAI GOLKAR KABUPATEN BONE
PERIODE 2013-2018**

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BONE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menegajawantahkan amanat CATUR SUKSES Partai Golkar, maka DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone akan mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bone untuk masa bakti 2013-2018;
- b. bahwa rekrutmen personality dan penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bone yang akan diusung oleh Partai Golkar, senantiasa berdasar pada kebijakan DPP Partai Golkar yang diputuskan berdasarkan Peraturan Organisasi Partai Golkar;
- c. bahwa sesuai ketentuan Komisi Pemilihan Umum, pencalonan Bupati dan Wakil Bupati harus dilakukan oleh Partai Politik sesuai tingkatannya;
- d. bahwa berdasarkan maksud pada huruf c di atas, maka pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bone yang akan diusung oleh Partai Golkar, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Nomor : 06/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya;
2. Keputusan Musyawarah Nasional VIII Partai Golongan Karya Nomor : 07/MUNAS-VIII/GOLKAR/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Pokok-Pokok Program Umum Partai Golongan Karya 2009-2015;
3. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : Juklak-13/DPP/GOLKAR/XI/2011, tanggal 5 November 2011 tentang Perubahan Juklak-02/DPP/GOLKAR/X/2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dari Partai Golkar;
4. Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: Kep-M.16/SK/DPD-II/PG/X/2010 tanggal 16 Oktober 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Periode 2009-2015;
5. Keputusan Musda VIII DPD Partai Golkar Kabupaten Bone, Nomor: 06/MUSDA-VIII/DPD-II/PG/VII/2010 Tantang Pokok-Pokok Program Kerja DPD Partai Golkar Kabupaten Bone Masa Bakti

- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor : R361/-GOLKAR/V/2012, tanggal 31 Mei 2012, Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bone;
2. Hasil Rapat Pleno Diperluas DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone pada tanggal 09 Juli 2012, bertempat di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Bone.

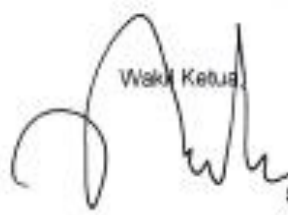
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN Drs. H.A. FAHSAR MAHDIN PAJALANGI, M.Si. DAN Drs. H. AMBO DALLE, MM. SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE DARI PARTAI GOLKAR KABUPATEN BONE PERIODE 2013-2018.

- PERTAMA** : Menetapkan Drs. H.A. Fahsar Mahdin Pajalangi, M.Si. sebagai Calon Bupati Bone berpasangan dengan Drs. H. Ambo Dalle, MM. sebagai calon Wakil Bupati Bone yang akan diusung oleh Partai Golkar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone, periode 2013-2018;
- KEDUA** : Menetapkan kata "TAFADAL" sebagai icon dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Drs. H.A. Fahsar Mahdin Pajalangi, M.Si. dan Drs. H. Ambo Dalle, MM. untuk digunakan dalam bersosialisasi;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 09 Juli 2012

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BONE

Wakil Ketua,

Drs. A. AKBAR YAHYA, MM
NPAPG 23130000005

Sekretaris,

H. FIRMAN BATARI, SH, MH
NPAPG 23130000015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta;
2. Yth. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Yth. Ketua Partai Golkar Kecamatan se- Kabupaten Bone, di Tempat;
4. Yth. Para Ketua Organisasi Pendiri dan Didirikan Partai Golkar, di Tempat;
5. Peringgal.